

Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Ruang Publik Ramah Terpadu Ramah Anak untuk Mendukung Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo Jakarta Utara

Wulan Nur Fauzia ^{1*}, Hasanul Bulqiyah ²

¹⁻² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta Utara
Corresponding Author's e-mail : wulannurfauzia.2236020022@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3081 - 3097

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3700>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3700>

Article History:

Received: 27-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : *Child development requires a safe, comfortable, and child-friendly environment to support optimal growth and development. One of the government's efforts to realize a Child-Friendly City is through the development of Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) as a public space that functions as a means of play, education, sports, social interaction, and community empowerment. This study aims to analyze the strategy of the Papanggo Village Government in the development of Child-Friendly Integrated Public Space to support a Child-Friendly City. This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, documentation, and literature studies. The research informants consisted of the Head of the Social Welfare Section (Kasie Kesra), the RPTRA Manager, the PKK Mobilization Team of Panggo Village, and the Head of RT. Data analysis used the Miles, Huberman, and Saldana models and David J. Korten's theory of strategy. The results of the study show that the strategy of the Papanggo Village Government is carried out through coordination with regional apparatus organizations, the provision of facilities and infrastructure, the implementation of various programs, and community involvement in the use of RPTRA. Although there are still obstacles in the maintenance of facilities and community participation, the strategy implemented is able to support the optimization of the function of RPTRA as a public space that contributes to realizing a Child-Friendly City.*

Keywords: *Government strategy; Child-Friendly Integrated Public Spaces; Child-Friendly City; Papanggo Village; David J. Korten.*

Abstrak: Perkembangan anak memerlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah melalui pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai sarana bermain, edukasi, olahraga, interaksi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak untuk mendukung Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Informan penelitian terdiri atas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasie Kesra), Pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, dan Ketua RT. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana serta teori strategi David J. Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan berbagai program, serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan RPTRA. Meskipun masih terdapat kendala dalam pemeliharaan fasilitas dan partisipasi masyarakat, strategi yang diterapkan mampu mendukung optimalisasi fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

Kata kunci: Strategi pemerintah; Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; Kota Layak Anak; Kelurahan Papanggo; David J. Korten.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa sekaligus generasi penerus yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang aman dan mendukung proses tumbuh kembangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Pada masa tersebut, terutama pada usia dini (0–6 tahun) dan usia sekolah (7–12 tahun), anak mengalami perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral yang sangat pesat sehingga memerlukan lingkungan yang mampu mendukung tumbuh kembangnya secara optimal.

Masa anak merupakan periode yang sangat menentukan kualitas kehidupan seseorang pada masa mendatang. Menurut teori perkembangan kognitif Piaget, kemampuan berpikir anak berkembang secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan biologis dan pengalaman belajar yang diperoleh dari lingkungan sekitarnya (Habsy & Rozi, 2023). Dikutip dalam (Wiyono & Lestari, 2024) Selain itu, Montessori menjelaskan bahwa masa usia dini merupakan *golden age*, yaitu periode sensitif yang hanya terjadi sekali dalam kehidupan sehingga anak sangat mudah menerima berbagai bentuk stimulasi dari lingkungan. Oleh karena itu, kualitas lingkungan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemampuan berpikir, serta keterampilan sosial anak.

Penerapan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki strategi yang berbeda dalam memenuhi hak-hak anak sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Arindi & Hidayat (2024) Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang dinilai berhasil dalam mewujudkan Kota Layak Anak melalui penyediaan taman kota, taman bermain, ruang terbuka hijau, serta berbagai ruang publik yang mendukung aktivitas belajar, bermain, dan berinteraksi bagi anak. Keberhasilan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak ke dalam perencanaan pembangunan, penguatan koordinasi antarperangkat daerah, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas publik secara berkelanjutan. Selain Surabaya, Novita (2020) Kota Bekasi juga terus mengembangkan berbagai taman tematik dan ruang publik ramah anak sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan sekaligus memenuhi hak anak atas ruang bermain yang aman dan nyaman. Sementara itu, Susiawati & Mashur (2025) Kota pekanbaru dan Nabila & Rasanjani (2024) Kota Banda aceh telah menunjukkan perkembangan yang baik dalam implementasi Kota Layak Anak melalui penyediaan ruang publik, peningkatan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memenuhi indikator Kota Layak Anak. Kasman dan Roihanah (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang terintegrasi, dukungan regulasi, pengalokasian anggaran yang memadai, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ruang publik ramah anak.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah metropolitan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya kepadatan penduduk, keterbatasan ruang terbuka hijau, alih fungsi lahan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang aman dan inklusif bagi anak. Kondisi tersebut menyebabkan penyediaan ruang publik di DKI Jakarta memerlukan strategi yang lebih komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang terus berkembang. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai inovasi kebijakan dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak melalui penyediaan ruang bermain, ruang edukasi, ruang interaksi sosial, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan RPTRA menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyediakan ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah anak untuk mendukung pemenuhan hak anak di wilayah perkotaan (Ramadhan & Saputra, 2025).

Sebagai ibu kota negara sekaligus wilayah metropolitan terbesar di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan Kota Layak Anak. Tingginya jumlah penduduk, pesatnya urbanisasi, keterbatasan ruang terbuka hijau, meningkatnya alih fungsi lahan, serta tingginya aktivitas sosial dan ekonomi menyebabkan ketersediaan ruang publik yang aman dan ramah anak semakin terbatas. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kesempatan anak untuk bermain, belajar, berinteraksi, dan mengembangkan kemampuan sosialnya dalam lingkungan yang aman dan sehat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang publik multifungsi yang mendukung pemenuhan hak anak melalui penyediaan ruang bermain, edukasi, interaksi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ruang terbuka hijau. Meskipun demikian, implementasi program RPTRA masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya pemanfaatan fasilitas, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta koordinasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat sehingga diperlukan penguatan strategi pengelolaan untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak (Rokaiyah *et al.*, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) maupun pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dari berbagai perspektif. Penelitian Rokaiyah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa implementasi program RPTRA di Kelurahan Sungai Bambu berkontribusi dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak melalui penyediaan ruang bermain, kegiatan edukatif, dan pemberdayaan masyarakat, meskipun efektivitas program masih dipengaruhi oleh pemeliharaan fasilitas serta partisipasi masyarakat. Wahanisa *et al.* (2025) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak dipengaruhi oleh aspek tata kelola, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak anak. Mukhlis *et al.* (2025) juga menegaskan bahwa pengelolaan ruang publik ramah anak memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak agar program dapat berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, konsep *Child Friendly Cities* yang dikembangkan UNICEF menekankan bahwa pemenuhan hak anak memerlukan penyediaan ruang publik yang aman, inklusif, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep tersebut diperkuat oleh Ramadhan dan Saputra (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Layak Anak tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas publik, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menyusun strategi, mengalokasikan sumber daya, membangun koordinasi antarpemangku kepentingan, serta melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Analisis implementasi strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan dan optimalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Papanggo mengacu pada teori strategi John M. Bryson yang menyatakan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan secara sistematis untuk mencapai tujuan organisasi melalui proses perencanaan, implementasi, pengorganisasian sumber daya, serta evaluasi kebijakan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil telaah terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi kebijakan Kota Layak Anak, efektivitas program RPTRA, evaluasi fasilitas, serta peran ruang publik dalam mendukung pemenuhan hak anak. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas implementasi strategi pemerintah pada tingkat kelurahan sebagai pelaksana langsung kebijakan, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi antarpemangku kepentingan, pemanfaatan fasilitas, dan evaluasi pengelolaan RPTRA. Perbedaan tersebut menjadi letak kebaruan penelitian ini, karena analisis difokuskan pada implementasi strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pembangunan dan pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Papanggo sebagai upaya mendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai strategi pemerintah pada tingkat kelurahan serta menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan RPTRA.

Lingkungan sosial dan fisik memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang anak. Salah satu kebutuhan utama anak adalah tersedianya ruang publik yang aman, nyaman,

dan mudah diakses sebagai sarana bermain, belajar, berinteraksi, serta mengembangkan kreativitas. Di wilayah perkotaan, penyediaan ruang publik ramah anak menjadi tantangan tersendiri akibat tingginya kepadatan penduduk, alih fungsi lahan, dan keterbatasan ruang terbuka hijau. Kondisi tersebut menyebabkan hak anak untuk memperoleh ruang bermain yang layak belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan Ichsan (2023), luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta masih berada di bawah standar ideal sebesar 30 persen dari luas wilayah. Selain itu, konsep Child-Friendly Cities yang dikembangkan UNICEF menekankan bahwa setiap kota perlu menyediakan ruang publik yang aman, inklusif, dan mudah diakses untuk mendukung tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak, Pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya pemenuhan hak-hak anak secara terintegrasi. Kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah didorong untuk menyediakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan komitmen tersebut melalui pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai implementasi kebijakan Kota Layak Anak. RPTRA dibangun berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan RPTRA serta kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan ruang publik ramah anak. RPTRA berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, sarana bermain anak, pusat kegiatan masyarakat, pemberdayaan perempuan, serta media edukasi dan interaksi sosial. Keberadaan RPTRA juga menjadi salah satu indikator pendukung terwujudnya Kota Layak Anak karena mampu memenuhi aspek perlindungan, partisipasi, dan tumbuh kembang anak. Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun RPTRA sebagai bentuk implementasi kebijakan Kota Layak Anak, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi fungsi RPTRA. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pemeliharaan sarana dan prasarana, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan RPTRA, serta perlunya penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan RPTRA tidak hanya memerlukan pembangunan fisik, tetapi juga strategi pengelolaan yang berkelanjutan agar mampu menjalankan fungsi edukasi, rekreasi, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan anak secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Kota Layak Anak dari berbagai sudut pandang, seperti implementasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, evaluasi program, maupun kontribusi RPTRA terhadap pemenuhan indikator Kota Layak Anak. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa RPTRA memiliki peran penting dalam menyediakan ruang publik yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemerintah pada tingkat kelurahan dalam pembangunan dan pengelolaan RPTRA sebagai implementasi kebijakan Kota Layak Anak.

Salah satu wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang turut mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak adalah Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, melalui keberadaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Lestari Indah. RPTRA tersebut menjadi fasilitas publik yang dimanfaatkan sebagai ruang bermain anak, sarana edukasi, pusat kegiatan masyarakat, ruang terbuka hijau, serta media pemberdayaan perempuan dan keluarga. Keberadaan RPTRA Lestari Indah merupakan implementasi dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan RPTRA tidak hanya bergantung pada tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi pemerintah dalam mengelola, mengembangkan program, serta mendorong partisipasi masyarakat sehingga keberadaan RPTRA benar-benar mampu mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pembangunan dan pengelolaan RPTRA merupakan bagian penting dari implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas implementasi kebijakan Kota Layak Anak, efektivitas program RPTRA, fungsi ruang publik ramah anak, serta pemberdayaan masyarakat melalui RPTRA. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, kajian ini memfokuskan analisis pada strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan dan optimalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak untuk mendukung Kota Layak Anak. Analisis difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi antarpemangku kepentingan, pemanfaatan fasilitas, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan RPTRA di Kelurahan Papanggo. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi strategi pemerintah dalam pengelolaan RPTRA sekaligus menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan RPTRA.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung terwujudnya Kota Layak Anak. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan strategi pemerintah, implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan RPTRA di Kelurahan Papanggo.

Penelitian dilaksanakan di RPTRA Lestari Indah, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara pada bulan Januari sampai Maret 2026. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Informan penelitian berjumlah empat orang, yaitu Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasie Kesra) Kelurahan Papanggo, Pengelola RPTRA Lestari Indah, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, dan tokoh masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT 09.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang relevan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pemerintah, pelaksanaan program, serta faktor pendukung dan penghambat pengelolaan RPTRA. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi fasilitas dan aktivitas masyarakat di RPTRA Lestari Indah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil penelitian melalui dokumen resmi, arsip pemerintah, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data Condensation), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Analisis dilakukan secara berulang selama proses penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pembangunan dan pengelolaan RPTRA Lestari Indah. Hasil analisis selanjutnya diinterpretasikan menggunakan Model Strategi Kooten untuk menganalisis strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pembangunan dan pengelolaan RPTRA Lestari Indah serta Model Implementasi Program David C. Korten untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Strategi Pemerintah dalam Pengembangan dan Optimalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan ruang publik yang aman, nyaman, inklusif, dan ramah bagi anak. Keberadaan RPTRA tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung pemenuhan hak anak melalui penyediaan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, olahraga, dan pemberdayaan keluarga. Oleh karena itu,

pengembangan RPTRA memerlukan strategi yang terencana agar seluruh fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal serta memberikan manfaat bagi anak-anak dan masyarakat Kelurahan Papanggo.

Strategi dalam pengembangan RPTRA menjadi aspek yang penting karena keberhasilan ruang publik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Papanggo. Fasilitas yang memadai tidak akan memberikan manfaat yang maksimal apabila tidak didukung oleh pengelolaan yang baik, pelaksanaan program yang berkelanjutan, dan keterlibatan pengguna dalam memanfaatkan ruang publik tersebut. Dengan demikian, strategi yang diterapkan menjadi dasar dalam memastikan bahwa RPTRA mampu menjalankan fungsinya sebagai ruang publik yang mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Di Kelurahan Papanggo, RPTRA dimanfaatkan oleh anak-anak, remaja, orang tua, lansia, serta masyarakat Kelurahan Papanggo untuk berbagai aktivitas. Keberadaan RPTRA tidak lagi dipandang hanya sebagai tempat bermain anak, tetapi juga sebagai ruang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, olahraga, pembinaan keluarga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Meningkatnya kebutuhan terhadap ruang publik yang berkualitas mendorong Pemerintah Kelurahan Papanggo untuk terus melakukan pengembangan sehingga RPTRA mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan lingkungan perkotaan.

Sebelum berbagai strategi dilaksanakan, pemanfaatan RPTRA masih lebih banyak berfokus pada fungsi rekreasi sebagai tempat bermain anak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang lebih produktif, fungsi tersebut berkembang menjadi ruang interaksi sosial, pusat pelayanan masyarakat, serta lokasi penyelenggaraan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Perubahan fungsi tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses pengelolaan yang melibatkan berbagai pihak sehingga RPTRA mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi anak-anak, orang tua, remaja, dan masyarakat Kelurahan Papanggo.

Pelaksanaan strategi tersebut melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pemerintah Kelurahan Papanggo berperan sebagai koordinator dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Dalam menjalankan perannya, Pemerintah Kelurahan Papanggo berkoordinasi dengan Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, serta Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo. Kolaborasi tersebut dilakukan agar penyediaan fasilitas, pelaksanaan program, dan pemanfaatan RPTRA dapat berjalan secara terarah serta sesuai dengan tujuan pengembangan Kota Layak Anak.

Setiap instansi memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dalam mendukung pengelolaan RPTRA. Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara berperan dalam pembinaan program yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan keluarga. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara bertanggung jawab terhadap pemeliharaan ruang terbuka hijau, sedangkan Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara mendukung penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Pengelola RPTRA bersama Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sedangkan masyarakat Kelurahan Papanggo berperan sebagai pengguna sekaligus mitra dalam menjaga keberlanjutan fungsi RPTRA. Pembagian tugas tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pengelolaan RPTRA memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat.

Melalui koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan, Pemerintah Kelurahan Papanggo tidak hanya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, tetapi juga mengoptimalkan pemanfaatan RPTRA melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, orang tua, remaja, dan masyarakat Kelurahan Papanggo. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan RPTRA tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan hak anak. Dengan demikian, strategi yang diterapkan mampu memperkuat fungsi RPTRA sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus menjadi salah satu pendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Sarana dan Prasarana	Peran dalam Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Aula serbaguna	Mendukung kegiatan pembinaan, pelatihan, rapat, dan kegiatan masyarakat.
Perpustakaan	Meningkatkan literasi dan menyediakan ruang belajar bagi anak.
Ruang laktasi	Mendukung pelayanan bagi ibu menyusui dan pemenuhan hak anak.
Taman bermain anak	Menyediakan ruang bermain yang aman dan mendukung perkembangan anak.
Jalur olahraga	Mendukung aktivitas fisik dan pola hidup sehat masyarakat.
Area hidroponik	Menjadi media edukasi lingkungan dan ketahanan pangan keluarga.
Kolam gizi	Mendukung edukasi mengenai gizi dan kesehatan keluarga.
Lapangan olahraga	Menjadi sarana olahraga serta memperkuat interaksi sosial masyarakat.

Sumber: Laporan Tahunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025.

Keberadaan sarana dan prasarana sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan Papanggo tidak hanya berfokus pada penyediaan ruang terbuka sebagai tempat bermain anak, tetapi juga berupaya menyediakan ruang publik yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat. Penyediaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan tersedianya berbagai fasilitas yang memiliki fungsi berbeda, RPTRA dapat dimanfaatkan sebagai ruang belajar, ruang bermain, ruang interaksi sosial, hingga tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Apabila ditinjau dari fungsi setiap fasilitas, seluruh sarana yang tersedia saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan berbagai program di RPTRA. Taman bermain memberikan ruang yang aman bagi anak untuk bermain dan berinteraksi, sedangkan perpustakaan dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak. Aula digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat, seperti penyuluhan, pelatihan keterampilan, rapat warga, serta pembinaan keluarga. Lapangan olahraga dimanfaatkan sebagai sarana meningkatkan aktivitas fisik masyarakat, sementara ruang laktasi mendukung kebutuhan ibu menyusui dan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa setiap fasilitas memiliki fungsi yang saling berkaitan sehingga mampu mendukung peran RPTRA sebagai ruang publik terpadu.

Selain fasilitas utama tersebut, keberadaan area hidroponik dan kolam gizi juga menunjukkan bahwa pengembangan RPTRA tidak hanya diarahkan pada penyediaan fasilitas rekreasi, tetapi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat Kelurahan Papanggo. Fasilitas tersebut dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan mengenai pemanfaatan lahan, pentingnya ketahanan pangan keluarga, serta kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, RPTRA tidak hanya menjadi tempat bermain bagi anak, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh anak, remaja, orang tua, maupun masyarakat secara umum.

Penyediaan sarana dan prasarana tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara Pemerintah Kelurahan Papanggo dengan suku dinas terkait, seperti Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, serta Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain itu, pengelola RPTRA bersama Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo juga berperan dalam memastikan bahwa seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Kerja sama tersebut

menunjukkan bahwa pengembangan RPTRA dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Dari sisi pemanfaatan, fasilitas yang tersedia digunakan secara aktif oleh masyarakat Kelurahan Papanggo dalam berbagai kegiatan. Anak-anak memanfaatkan taman bermain dan perpustakaan sebagai sarana bermain sekaligus belajar. Orang tua memanfaatkan aula untuk mengikuti penyuluhan kesehatan, kegiatan pembinaan keluarga, maupun pelatihan keterampilan. Sementara itu, remaja dan masyarakat umum memanfaatkan lapangan olahraga sebagai tempat berolahraga dan melakukan berbagai aktivitas fisik. Tingginya pemanfaatan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa RPTRA telah berkembang menjadi ruang publik yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya bagi anak sebagai sasaran utama program.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa strategi yang diterapkan Pemerintah Kelurahan Papanggo tidak hanya berorientasi pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga pada upaya mengoptimalkan fungsi setiap sarana agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Fasilitas yang tersedia tidak dibiarkan hanya sebagai pelengkap, melainkan didukung dengan berbagai kegiatan yang mampu meningkatkan intensitas pemanfaatannya oleh masyarakat. Dengan demikian, pengembangan RPTRA tidak hanya menghasilkan ruang publik yang lebih baik secara fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori strategi yang dikemukakan oleh David J. Korten yang menekankan pentingnya kesesuaian antara organisasi pelaksana, program, dan kelompok sasaran. Dalam pengembangan RPTRA di Kelurahan Papanggo, organisasi pelaksana telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sementara fasilitas yang disediakan mendukung pelaksanaan berbagai program yang dibutuhkan masyarakat. Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyediaan sarana, tetapi juga diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh fasilitas benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Papanggo.

Melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, RPTRA di Kelurahan Papanggo telah berkembang menjadi ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain anak, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan yang dilakukan Pemerintah Kelurahan Papanggo telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

Peneliti berpendapat bahwa keberhasilan tersebut menunjukkan pembangunan RPTRA di Kelurahan Papanggo tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada bagaimana fasilitas tersebut dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan strategi pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya sarana yang tersedia, melainkan dari kemampuan pemerintah dalam memastikan setiap fasilitas mendukung pemenuhan hak anak serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025

Bidang Program	Jumlah Kegiatan	Makna Strategis
Kelompok Kerja I	47	Penguatan pembinaan keluarga dan masyarakat.
Kelompok Kerja II	12	Mendukung pendidikan dan pengembangan keterampilan masyarakat.
Kelompok Kerja III	11	Mendukung kegiatan ekonomi keluarga.
Kelompok Kerja IV	115	Memperkuat program kesehatan, olahraga, dan pelestarian lingkungan.

Sumber: Laporan Tahunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025.

Tabel 4.2 menggambarkan bahwa pengembangan RPTRA di Kelurahan Papanggo tidak hanya dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga melalui pelaksanaan berbagai program yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Papanggo. Program yang dilaksanakan menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo untuk mengoptimalkan fungsi RPTRA sehingga tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat bermain anak, tetapi juga sebagai ruang publik yang mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program secara berkelanjutan menunjukkan bahwa pengembangan RPTRA lebih diarahkan pada peningkatan kualitas pemanfaatan fasilitas daripada hanya menambah jumlah fasilitas yang tersedia.

Berdasarkan analisis peneliti, keberagaman program yang dilaksanakan menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo tidak lagi hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga pada upaya mengoptimalkan pemanfaatan RPTRA melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa keberhasilan strategi tersebut tidak ditentukan oleh banyaknya program yang dilaksanakan, melainkan oleh kemampuan program dalam memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, remaja, orang tua, dan masyarakat Kelurahan Papanggo sehingga fungsi RPTRA sebagai ruang publik ramah anak dapat berjalan secara optimal.

Keberagaman program tersebut mencerminkan upaya Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara dalam menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan anak-anak, orang tua, remaja, dan masyarakat Kelurahan Papanggo. Program pendidikan memberikan ruang bagi anak untuk memperoleh pengetahuan di luar lingkungan sekolah, sedangkan kegiatan kesehatan mendukung peningkatan kesadaran orang tua terhadap kesehatan ibu dan anak. Di sisi lain, kegiatan olahraga dan pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kelurahan Papanggo untuk meningkatkan interaksi sosial sekaligus memanfaatkan RPTRA sebagai ruang kegiatan bersama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa strategi pengembangan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada upaya menghadirkan program yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan berbagai program tersebut turut mengubah fungsi RPTRA di Kelurahan Papanggo. Apabila sebelumnya RPTRA lebih dikenal sebagai ruang bermain anak, saat ini keberadaannya berkembang menjadi ruang publik yang dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat. Anak-anak menggunakan RPTRA sebagai tempat bermain dan belajar, orang tua mengikuti penyuluhan maupun kegiatan pembinaan keluarga, sedangkan remaja memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk kegiatan olahraga dan aktivitas sosial. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa program yang dilaksanakan mampu meningkatkan fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang lebih inklusif serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kelurahan Papanggo secara lebih luas.

Keberhasilan pelaksanaan program tidak terlepas dari kerja sama antara Pemerintah Kelurahan Papanggo, Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo. Masing-masing pihak menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki, mulai dari penyusunan program, pelaksanaan kegiatan, hingga pendampingan kepada masyarakat. Di sisi lain, partisipasi masyarakat Kelurahan Papanggo menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan setiap program sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat sebagai pengguna sekaligus penerima manfaat RPTRA. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan RPTRA dilaksanakan melalui kolaborasi yang saling mendukung sehingga program yang direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Apabila dikaitkan dengan teori David J. Korten, peran RPTRA di Kelurahan Papanggo menunjukkan adanya kesesuaian antara organisasi pelaksana, program, dan kelompok sasaran. Pemerintah Kelurahan Papanggo, Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo melaksanakan berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, orang tua, remaja, serta masyarakat Kelurahan Papanggo. Kesesuaian tersebut terlihat dari pemanfaatan RPTRA yang tidak hanya digunakan sebagai tempat bermain, tetapi juga sebagai ruang pendidikan,

pelayanan kesehatan, olahraga, dan kegiatan sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi yang diterapkan telah mampu menghubungkan program dengan kebutuhan kelompok sasaran sehingga fungsi RPTRA menjadi lebih optimal.

Peran RPTRA dalam mendukung indikator Kota Layak Anak juga tercermin dari tingginya pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat Kelurahan Papanggo. Anak-anak memperoleh ruang yang aman untuk bermain dan belajar, orang tua mendapatkan akses terhadap kegiatan pembinaan keluarga dan pelayanan kesehatan, sedangkan remaja memanfaatkan fasilitas olahraga dan ruang terbuka sebagai sarana beraktivitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa RPTRA tidak hanya memberikan manfaat bagi anak sebagai sasaran utama kebijakan, tetapi juga mampu meningkatkan interaksi sosial dan partisipasi masyarakat Kelurahan Papanggo dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Mendukung Indikator Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui pembangunan yang mengintegrasikan komitmen pemerintah, dunia usaha, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan regulasi, tetapi juga melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah penyediaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) yang berfungsi sebagai ruang terbuka yang aman, nyaman, inklusif, dan mudah diakses oleh anak maupun masyarakat.

Keberadaan RPTRA memiliki peran yang lebih luas dibandingkan sekadar menyediakan tempat bermain bagi anak. RPTRA dirancang sebagai ruang publik yang mampu mendukung berbagai kebutuhan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, olahraga, kegiatan sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan RPTRA tidak hanya diukur dari tersedianya fasilitas fisik, tetapi juga dari sejauh mana fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat dan mampu memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan hak anak. Semakin optimal pemanfaatan RPTRA, semakin besar pula kontribusinya terhadap pencapaian indikator Kota Layak Anak.

Di Kelurahan Papanggo, RPTRA telah menjadi salah satu ruang publik yang dimanfaatkan oleh anak-anak, remaja, orang tua, serta masyarakat Kelurahan Papanggo untuk melakukan berbagai aktivitas. Keberadaan RPTRA tidak hanya menjadi tempat bermain bagi anak, tetapi juga menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan, pelayanan kesehatan, olahraga, pembinaan keluarga, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Beragam aktivitas tersebut menunjukkan bahwa RPTRA telah berkembang menjadi ruang publik yang memiliki fungsi sosial sekaligus

edukatif dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Papanggo.

Pemanfaatan RPTRA oleh berbagai kelompok masyarakat juga menunjukkan bahwa keberadaannya mampu menjangkau kebutuhan yang berbeda-beda. Anak-anak memanfaatkan RPTRA sebagai tempat bermain dan belajar, remaja menggunakan fasilitas olahraga maupun ruang terbuka sebagai tempat beraktivitas bersama, sedangkan orang tua memanfaatkan berbagai kegiatan pembinaan keluarga, penyuluhan kesehatan, maupun kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama pengelola RPTRA. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa satu ruang publik mampu memberikan manfaat kepada berbagai kelompok usia sehingga fungsi RPTRA menjadi lebih optimal dibandingkan apabila hanya dimanfaatkan oleh satu kelompok masyarakat.

Peran RPTRA dalam mendukung Kota Layak Anak juga terlihat dari kemampuannya menciptakan ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo, Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, serta Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di RPTRA. Melalui kegiatan tersebut, anak-anak, orang tua, remaja, dan masyarakat Kelurahan Papanggo memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang sebelumnya hanya dapat diperoleh melalui instansi tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa RPTRA tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai media pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.

Selain memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan, keberadaan RPTRA juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap berbagai program pemerintah. Kegiatan yang diselenggarakan secara rutin mendorong masyarakat Kelurahan Papanggo untuk memanfaatkan RPTRA

sebagai tempat berinteraksi, berdiskusi, mengikuti pelatihan, maupun berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa keberadaan RPTRA telah diterima sebagai ruang publik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program pemerintah di tingkat kelurahan.

Peran tersebut tidak terlepas dari strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam mengoptimalkan fungsi RPTRA. Penyediaan fasilitas yang memadai perlu diimbangi dengan penyelenggaraan program yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki alasan untuk terus memanfaatkan RPTRA. Apabila fasilitas tersedia tetapi tidak diikuti dengan kegiatan yang rutin, maka fungsi RPTRA sebagai ruang publik akan berkurang karena masyarakat hanya datang pada waktu-waktu tertentu. Sebaliknya, pelaksanaan program yang dilakukan secara berkesinambungan mampu meningkatkan intensitas kunjungan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi RPTRA sebagai pusat aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu, tingkat pemanfaatan RPTRA menjadi salah satu aspek yang penting untuk dianalisis dalam penelitian ini. Tingginya jumlah pengunjung tidak hanya menggambarkan bahwa fasilitas yang tersedia dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi juga mengindikasikan bahwa program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo mampu menarik partisipasi anak-anak, orang tua, remaja, serta masyarakat Kelurahan Papanggo. Dengan demikian, jumlah pengunjung dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat peran RPTRA dalam mendukung implementasi Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemanfaatan RPTRA oleh masyarakat Kelurahan Papanggo, penelitian ini menggunakan data jumlah pengunjung RPTRA selama tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar untuk menganalisis sejauh mana RPTRA dimanfaatkan oleh masyarakat serta bagaimana tingkat pemanfaatan tersebut mencerminkan peran RPTRA dalam mendukung indikator Kota Layak Anak.

Tabel 4.3 Jumlah Pengunjung Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025

Bulan	Jumlah Pengunjung
Januari	1.829
Februari	1.926
Maret	1.823
April	1.952
Mei	1.407
Juni	1.740
Juli	2.089
Agustus	2.058
September	2.153
Oktober	2.100
November	2.000

Sumber: Laporan Tahunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025.

Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa jumlah pengunjung RPTRA Kelurahan Papanggo mengalami fluktuasi selama tahun 2025, namun secara umum tingkat kunjungan tetap berada pada angka yang cukup tinggi dengan rata-rata lebih dari 1.800 pengunjung setiap bulan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa RPTRA masih menjadi ruang publik yang dimanfaatkan secara aktif oleh anak-anak, remaja, orang tua, serta masyarakat Kelurahan Papanggo. Fluktuasi jumlah pengunjung merupakan kondisi yang wajar karena

dipengaruhi oleh pelaksanaan program, aktivitas masyarakat, serta waktu penyelenggaraan kegiatan. Meskipun demikian, data tersebut mengindikasikan bahwa RPTRA tetap memiliki daya tarik sebagai ruang publik yang mampu mengakomodasi berbagai aktivitas masyarakat.

Berdasarkan analisis peneliti, tingginya jumlah pengunjung menunjukkan bahwa RPTRA telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara aktif. Namun, peneliti berpendapat bahwa jumlah pengunjung tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan pengembangan RPTRA. Keberhasilan tersebut juga harus diukur dari kualitas pelayanan, kondisi fasilitas, keberlanjutan program, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam mendukung pemenuhan hak anak.

Tingkat kunjungan yang relatif stabil menunjukkan bahwa fasilitas dan program yang disediakan telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kelurahan Papanggo. Anak-anak memanfaatkan RPTRA sebagai tempat bermain sekaligus belajar melalui berbagai kegiatan edukatif, sedangkan orang tua mengikuti penyuluhan kesehatan, pembinaan keluarga, dan kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan di RPTRA. Di sisi lain, remaja memanfaatkan lapangan olahraga dan ruang terbuka sebagai sarana berolahraga maupun berinteraksi dengan teman sebaya. Keberagaman aktivitas tersebut memperlihatkan bahwa RPTRA tidak hanya berfungsi sebagai ruang bermain anak, tetapi juga menjadi ruang publik yang memberikan manfaat bagi berbagai kelompok masyarakat.

Pemanfaatan RPTRA yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan bahwa program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan bersama Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo mampu mendorong anak-anak, orang tua, remaja, serta masyarakat Kelurahan Papanggo untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara lebih optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program memiliki pengaruh terhadap meningkatnya fungsi RPTRA sebagai pusat kegiatan masyarakat sekaligus sebagai ruang yang mendukung pemenuhan hak anak.

Peran RPTRA dalam mendukung indikator Kota Layak Anak juga terlihat dari kemampuannya menyediakan ruang yang aman, nyaman, dan mudah diakses oleh anak. Selain memperoleh ruang

bermain yang layak, anak-anak Kelurahan Papanggo juga memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan, olahraga, dan pembinaan yang mendukung perkembangan sosial maupun keterampilan mereka. Orang tua memperoleh manfaat melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan keluarga, sedangkan masyarakat Kelurahan Papanggo memiliki ruang untuk berinteraksi, bermusyawarah, dan mengikuti berbagai kegiatan sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan RPTRA memberikan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh anak, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori David J. Korten yang menekankan adanya kesesuaian antara program dan kelompok sasaran. Program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo telah disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, orang tua, remaja, serta masyarakat Kelurahan Papanggo. Kesesuaian tersebut tercermin dari tingginya pemanfaatan RPTRA sepanjang tahun 2025 sehingga keberadaan RPTRA tidak hanya menjadi fasilitas publik, tetapi juga berperan dalam mendukung pemenuhan indikator Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

b. Tantangan dan Upaya Penguatan Optimalisasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Keberhasilan pengembangan ruang publik terpadu ramah anak tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana maupun pelaksanaan berbagai program, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga keberlanjutan fungsi RPTRA. Setelah berbagai strategi diterapkan dan RPTRA dimanfaatkan oleh anak-anak, orang tua, remaja, serta masyarakat Kelurahan Papanggo, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian agar fungsi RPTRA tetap berjalan secara optimal. Tantangan tersebut perlu diidentifikasi karena dapat memengaruhi kualitas pelayanan, kenyamanan pengunjung, serta keberlangsungan berbagai program yang telah dilaksanakan.

Pengelolaan RPTRA merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan. Fasilitas yang telah tersedia memerlukan pemeliharaan secara rutin, sedangkan program yang telah berjalan memerlukan

evaluasi agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Papanggo. Tanpa adanya pemeliharaan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak-anak maupun masyarakat dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, optimalisasi RPTRA tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan pengelola dalam menjaga kualitas fasilitas dan pelaksanaan program secara berkesinambungan.

Di Kelurahan Papanggo, pengelolaan RPTRA melibatkan Pemerintah Kelurahan Papanggo, Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, serta masyarakat Kelurahan Papanggo. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemerintah Kelurahan Papanggo berperan dalam melakukan koordinasi dan pembinaan, Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program yang berkaitan dengan perlindungan anak, sedangkan pengelola RPTRA bertanggung jawab terhadap pengelolaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Di sisi lain, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga, sementara masyarakat Kelurahan Papanggo berperan sebagai pengguna sekaligus mitra dalam menjaga fasilitas yang telah disediakan.

Meskipun koordinasi antar pihak telah berjalan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan RPTRA masih menghadapi beberapa kendala yang dapat memengaruhi optimalisasi fungsi ruang publik tersebut. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi sarana dan prasarana, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku pengguna fasilitas, tingkat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pengawasan terhadap anak selama berada di RPTRA, serta dukungan berbagai pihak dalam pengembangan fasilitas. Apabila berbagai kendala tersebut tidak ditangani secara berkelanjutan, kualitas pelayanan yang diberikan kepada anak-anak dan masyarakat Kelurahan Papanggo berpotensi mengalami penurunan.

Keberadaan berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan RPTRA merupakan proses yang memerlukan evaluasi secara terus-menerus. Penyediaan fasilitas dan pelaksanaan program yang telah dilakukan perlu diimbangi dengan upaya menjaga kualitas pelayanan agar manfaat RPTRA tetap dapat dirasakan oleh anak-anak, orang tua, remaja, dan masyarakat Kelurahan Papanggo. Dengan demikian, identifikasi terhadap berbagai kendala menjadi bagian penting dalam merumuskan langkah penguatan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, serta masyarakat Kelurahan Papanggo.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan RPTRA di Kelurahan Papanggo. Identifikasi tersebut disusun berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilakukan selama penelitian sehingga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi fungsi RPTRA. Berbagai tantangan tersebut disajikan pada Tabel 4.4 sebagai dasar untuk menganalisis upaya penguatan pengelolaan RPTRA dalam mendukung Kota Layak Anak.

Tabel 4.4 .Tantangan Pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025

No	Tantangan	Dampak terhadap Pengelolaan
1	Kerusakan beberapa fasilitas	Mengurangi kenyamanan dan keamanan pengunjung
2	Gangguan kamera pengawas	Pengawasan area menjadi kurang optimal
3	Kesadaran menjaga kebersihan masih rendah	Kebersihan lingkungan kurang terjaga
4	Pengawasan orang tua belum optimal	Risiko kecelakaan pada anak meningkat
5	Dukungan pihak swasta masih terbatas	Pengembangan fasilitas belum maksimal

Sumber: Hasil wawancara dengan Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan Laporan Tahunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Tahun 2025.

Tabel 4.4 memperlihatkan bahwa tantangan dalam pengelolaan RPTRA di Kelurahan Papanggo tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek pengelolaan dan partisipasi pengguna. Kerusakan beberapa fasilitas, gangguan kamera pengawas, rendahnya kesadaran menjaga kebersihan, kurangnya pengawasan terhadap anak, serta terbatasnya dukungan dari pihak swasta menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi fungsi RPTRA. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas saja belum cukup untuk menjaga kualitas pelayanan apabila tidak diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan analisis peneliti, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengembangan RPTRA masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemeliharaan fasilitas, pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa penyediaan fasilitas dan pelaksanaan program yang baik belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan sehingga manfaat RPTRA dapat terus dirasakan oleh masyarakat.

Peneliti berpendapat bahwa berbagai kendala yang masih ditemukan menunjukkan strategi pengembangan RPTRA belum sepenuhnya optimal. Penyediaan fasilitas dan pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, namun aspek pemeliharaan, pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat masih memerlukan perhatian yang lebih besar. Apabila aspek tersebut tidak diperkuat, maka kualitas pelayanan RPTRA berpotensi mengalami penurunan meskipun jumlah fasilitas dan program terus bertambah.

Kerusakan fasilitas menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian karena berpengaruh terhadap kenyamanan dan keamanan anak-anak maupun masyarakat Kelurahan Papanggo yang memanfaatkan RPTRA. Fasilitas yang tidak berada dalam kondisi baik dapat mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung serta membatasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, pemeliharaan fasilitas secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang aman dan nyaman.

Selain kondisi fasilitas, pengawasan terhadap lingkungan RPTRA juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Gangguan pada kamera pengawas dapat mengurangi efektivitas pemantauan terhadap aktivitas yang berlangsung di area RPTRA sehingga berpotensi memengaruhi keamanan pengunjung. Di sisi lain, pengawasan orang tua terhadap anak selama memanfaatkan fasilitas juga masih memerlukan perhatian. Anak-anak yang menggunakan area bermain tetap membutuhkan pendampingan agar aktivitas bermain berlangsung dengan aman dan sesuai dengan fungsi fasilitas yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola RPTRA, tetapi juga memerlukan keterlibatan orang tua sebagai pendamping utama anak.

Tantangan lain yang masih ditemukan adalah rendahnya kepedulian sebagian masyarakat Kelurahan Papanggo terhadap kebersihan lingkungan RPTRA. Meskipun telah tersedia tempat sampah dan fasilitas pendukung lainnya, masih terdapat pengunjung yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan RPTRA tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sarana, tetapi juga oleh kesadaran pengguna dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas sesuai dengan fungsinya. Apabila kesadaran tersebut terus ditingkatkan, kualitas lingkungan RPTRA akan tetap terjaga sehingga memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung.

Dukungan dari berbagai pihak juga menjadi faktor yang memengaruhi pengembangan RPTRA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas masih terbatas sehingga beberapa kebutuhan pengembangan belum dapat dipenuhi secara maksimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengembangan RPTRA memerlukan kolaborasi yang lebih luas, tidak hanya antara Pemerintah Kelurahan Papanggo, Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, tetapi juga melibatkan pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap penyediaan ruang publik ramah anak. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas fasilitas maupun pelaksanaan program sehingga manfaat RPTRA dapat dirasakan secara lebih optimal.

Berbagai tantangan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kelurahan Papanggo untuk melakukan upaya penguatan pengelolaan RPTRA. Upaya yang dilakukan tidak hanya berupa perbaikan fasilitas yang mengalami kerusakan, tetapi juga meningkatkan koordinasi dengan Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, serta masyarakat Kelurahan Papanggo dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keberlangsungan berbagai program yang telah berjalan. Langkah tersebut diperlukan agar fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang ramah anak tetap terjaga dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh pengunjung.

Apabila dikaitkan dengan teori David J. Korten, berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya dipengaruhi oleh kesesuaian antara organisasi pelaksana, program, dan kelompok sasaran, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan program. Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama Suku Dinas PPAPP Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, dan Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo telah berupaya mempertahankan fungsi RPTRA melalui pemeliharaan fasilitas, koordinasi antarinstansi, serta pelibatan masyarakat Kelurahan Papanggo. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengelolaan RPTRA tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pengelolaan agar manfaat RPTRA dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan RPTRA di Kelurahan Papanggo masih dapat diatasi melalui koordinasi yang berkelanjutan, pemeliharaan fasilitas secara berkala, peningkatan partisipasi masyarakat Kelurahan Papanggo, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan adanya upaya tersebut, fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan ramah anak diharapkan tetap terjaga sehingga mampu mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) untuk mendukung Kota Layak Anak telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, yaitu Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Utara, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara, pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, serta masyarakat. Strategi tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan program pendidikan, kesehatan, olahraga, interaksi sosial, dan pemberdayaan masyarakat, serta optimalisasi pemanfaatan RPTRA sebagai ruang publik yang mendukung pemenuhan hak anak. Berdasarkan analisis menggunakan teori David J. Korten, strategi yang diterapkan menunjukkan adanya kesesuaian antara organisasi pelaksana, program, dan kelompok sasaran, sehingga RPTRA tidak hanya berfungsi sebagai tempat bermain anak, tetapi juga sebagai ruang yang mendukung berbagai aktivitas masyarakat dan pemenuhan beberapa indikator Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

Meskipun demikian, pengembangan RPTRA masih menghadapi beberapa kendala, antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana yang belum optimal, gangguan pada fasilitas pendukung, pengawasan terhadap fasilitas yang masih perlu ditingkatkan, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga kebersihan dan memanfaatkan fasilitas secara bertanggung jawab, serta masih terbatasnya dukungan pihak swasta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan RPTRA tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas dan banyaknya program, tetapi juga oleh kualitas koordinasi antarinstansi, keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, serta kemampuan pemerintah dan pengelola dalam melakukan pemeliharaan dan evaluasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan menjadi hal penting agar manfaat RPTRA dapat dirasakan oleh masyarakat secara optimal dan berkesinambungan.

Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Kelurahan Papanggo bersama instansi terkait, pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana, pengawasan fasilitas, serta evaluasi pelaksanaan program secara berkala. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga perlu dilakukan melalui edukasi dan pembinaan

secara berkelanjutan agar tumbuh kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan pemanfaatan fasilitas sesuai dengan fungsinya. Selain itu, kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perlu diperluas untuk mendukung pengembangan fasilitas maupun keberlanjutan program, sehingga kualitas pengelolaan RPTRA dapat semakin meningkat dan keberadaannya mampu memberikan manfaat yang lebih luas dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di Kelurahan Papanggo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, arahan, serta kontribusi baik secara moril maupun materil selama pelaksanaan kegiatan hingga penyusunan laporan ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada pihak instansi terkait, pembimbing, narasumber, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan. Dukungan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti dalam menunjang kelancaran serta keberhasilan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiansyah, A., & Bayquni, B. (2022). Peran Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Bintaro Jakarta Selatan. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 6(2), 147–158.
- Habsy, B. A., & Rozi, F. (2023). Teori perkembangan kognitif Jean Piaget dan implementasinya dalam pembelajaran. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 452–461.
- Kasman, T. M. S., & Roihanah, I. (2023). Identifikasi Kriteria Evaluasi Perancangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) DKI Jakarta. *Vitruvian: Jurnal Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, 13(1).
- Mukhlis, M., Muammar, & Maghfirah, F. (2025). Towards a Child-Friendly City in East Aceh through Collaborative Governance and Local Challenges. *Academia Open*, 10(1).
- Ramadhan, A. K., & Saputra, E. (2025). Green Open Space Planning Based on Spatial Justice in Jakarta: Study of Child Friendly Integrated Public Spaces/RPTRA and General Green Open Space. *Journal of Placemaking and Streetscape Design*, 2(2), 100–120.
- Rokaiyah, R., Noer, K. U., Satispi, E., & Salam, R. (2024). Effectiveness of Implementing the RPTRA Program in Creating a Child Friendly City in Sungai Bambu District, North Jakarta Administrative City. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 22(2), 54–71.
- UNICEF. (2018). *Shaping Urbanization for Children: A Handbook on Child-Responsive Urban Planning*.
- Wahanisa, R., Riyanto, R. B., Mukminto, E., Syahwal, S. E., Adiyatma, S. E., & Nnawulezi, U. (2025). Advancing Child Rights in Urban Governance: An Analysis of Policy Implementation and Challenges in the Child-Friendly City Initiative in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 389–408.
- Wiyono, S., & Lestari, P. (2024). Implementasi metode Maria Montessori pada periode sensitif anak usia dini. *Jurnal Edukasi Anak*, 13(1), 34–46.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2015). Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Arrohmati, L. L., & Pertiwi, V. I. (2024). Implementasi Program KAS-RPA Kampung Asuh dalam Mewujudkan Surabaya Kota Layak Anak. *Journal Publicuho*, 7(1).
- Arindi, A. P., & Hidayat, E. (2024). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) melalui Pengoptimalan Program PUSPAGA Kota Surabaya. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 10267–

10278. Novita, D. (2020). Kebijakan Kota Layak Anak: Program Rumah Pintar sebagai Ruang Publik untuk Pemanfaatan Waktu Luang Anak di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*.
- Susiawati, T., & Mashur. (2025). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.
- Nabila, A., Rasanjani, S., dkk. (2024). Analisis Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh Menurut Indikator Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*.
- Ichsan, M. (2023). Tantangan Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Planologi*, 20(1), 45–58.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Bowen, G. A. (2009).